



DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SURABAYA

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA 2025

www.dishub.surabaya.go.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	4
I.3. Maksud dan Tujuan	9
I.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan.	9
I.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan.....	9
I.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	11
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
BAB IV. PENUTUP.....	iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	19
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	
Tabel 3.1	29
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui evaluasi kinerja serta penajaman indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 343 ayat 1 bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah berperan penting untuk mendorong kinerja suatu Perangkat Daerah dalam memaksimalkan kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II, kondisi

keuangan daerah serta kondisi lain yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan.

Prinsip – prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, sesuai Urusan yang diampu, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dan mengacu pada RKPD;
- b. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif;
- c. Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas perubahan renja Dinas Perhubungan tahun 2024 sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan dokumen rancangan RKPD perubahan yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran, rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Bappedalitbang paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah untuk diverifikasi dengan tujuan memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.

Berdasarkan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RKPD Perubahan. Rancangan akhir RKPD Perubahan dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD. Walikota menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD Perubahan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada gubernur melalui kepala Bappedalitbang untuk difasilitasi. Rancangan Perkada tentang RKPD Perubahan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.

Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Perubahan. Penyusunan rancangan akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Perubahan ditetapkan. Rancangan akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala Bappedalitbang untuk diverifikasi dengan tujuan memastikan rancangan akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Perubahan.

Bappedalitbang menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Perubahan ditetapkan. Renja Perubahan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Perubahan dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disampaikan pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD Perubahan. Dokumen Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024 menjadi pedoman penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Tahun 2024.

I.2. Landasan Hukum

1. Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2025 meliputi :
 - 1) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 - 10) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota (jdih.dephub.go.id);
 - 11) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten / Kota (jdih.dephub.go.id);
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 - 13) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;
- 15) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023- 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
- 21) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 2 Seri E)
- 22) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 5);

- 23) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 7);
 - 24) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);
 - 25) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 3);
 - 26) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 81);
 - 27) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 130).
 - 28) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 42).
2. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Perhubungan
- 1) Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Kewenangan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya adalah sebagai berikut :
 - (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf l adalah Dinas Perhubungan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.

2) Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya selanjutnya terinci sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Prasarana Transportasi;
- d. Bidang Lalu Lintas;
- e. Bidang Angkutan;
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- g. UPTD Pengelolaan Transportasi Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Dinas Perhubungan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pengelolaan Transportasi Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

- 4) Tugas Pokok dan Fungsi UPT Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan adalah :

1. Sebagai salah satu landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (R APBD-P) Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2025.
2. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Dinas Perhubungan jangka pendek (1 tahun).
3. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Dinas Perhubungan, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun 2025 Dinas Perhubungan.

I.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan adalah :

1. Mewujudkan sinergi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Surabaya tahun 2025.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Perhubungan dalam jangka 1 tahun.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan rencana anggaran Dinas Perhubungan.

I.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat / menjelaskan latar belakang, maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran

tentang perubahan kerangka ekonomi daerah sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Pada Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pencapaian indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2021 – 2026 pada tahun 2025 sampai dengan triwulan I

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru / kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini memuat perubahan yang dapat terjadi pada Rencana Kerja Perubahan karena alasan tertentu dan narasi terkait dukungan semua pihak dalam pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2025 dilaksanakan dalam 4 (empat) program yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran, dan Program Pengelolaan Perkeretaapian. Program – program tersebut diwujudkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi Renja Dinas Perhubungan tahun 2025 sampai dengan triwulan I dijabarkan secara lengkap pada tabel 2.1 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diukur dengan indikator Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan dengan target 92%. Capaian indikator program sampai dengan triwulan I sebesar 0%. Prediksi pencapaian sampai dengan triwulan 4 akan dapat tercapai dengan asumsi bahwa kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor telah terpenuhi dengan baik. Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 100%. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang diukur dengan indikator Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target output 100% dan anggaran Rp. 61.276.734.000. Realisasi output sampai dengan triwulan I adalah 200% karena Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN selalu dapat diberikan setiap bulannya. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran dengan target 100%. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) sub kegiatan yaitu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diukur dengan indikator Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran dengan target output 100% dan anggaran Rp. 5.647.613.000. Realisasi output sampai dengan triwulan I adalah 200% karena ketersediaan barang dan jasa perkantoran selalu dapat terpenuhi setiap bulannya. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dengan target 100%. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang diukur dengan indikator Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dengan target output 100% dan anggaran Rp. 7.887.159.000. Realisasi output sampai dengan triwulan I adalah 200% karena pemeliharaan sarana prasarana perkantoran selalu dapat terpenuhi setiap bulannya. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

d. Peningkatan Pelayanan BLUD

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah laporan peningkatan pelayanan BLUD Parkir Tepi Jalan Umum dengan target 53 laporan dan indikator Jumlah laporan peningkatan pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum dengan target 12 laporan. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan indikator Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan dengan target 1 unit kerja dan anggaran Rp. 13.392.600.000. Realisasi output sampai dengan triwulan I sebesar 2 unit kerja dan penyerapan anggaran Rp. 0. Capaian output sampai dengan triwulan I sebesar 100% dan anggaran 0% dimana capaian output ini kurang sesuai dengan target per triwulan I dan penyerapan anggaran kurang dari 100% hal ini dapat dikatakan adanya efisiensi anggaran. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

- 2) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan indikator Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan dengan target 1 unit kerja dan anggaran Rp. 15.959.893.000. Realisasi output sampai dengan triwulan I sebesar 1 unit kerja dan penyerapan anggaran Rp. 0. Capaian output sampai dengan triwulan I sebesar 100% dan anggaran 0% dimana capaian output ini kurang sesuai dengan target per triwulan I dan penyerapan anggaran kurang dari 100% hal ini dapat dikatakan adanya efisiensi anggaran. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu :

- a. Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan dengan target 48,70%. Capaian indikator program sampai dengan triwulan I sebesar 136,51%;
- b. Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota dengan target 48 km/jam. Capaian indikator program sampai dengan triwulan I sebesar 0,00%;
- c. Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya dengan target 80%. Capaian indikator program sampai dengan triwulan I sebesar 115,81%;
- d. Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya dengan target 80%. Capaian indikator program sampai dengan triwulan I sebesar 100,00%.

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya dengan target 15 lokasi dan Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya dengan target 31 Kawasan. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Prasarana Jalan Kabupaten/Kota yang terbangun dengan target 3000 unit dan anggaran Rp. 64.141.775.000, realisasi output sampai dengan triwulan I adalah 368 unit dan penyerapan anggaran Rp.

523.314.000. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia dengan target 2500 unit dan anggaran Rp. 10.738.926.000, realisasi output sampai dengan triwulan I adalah 0 unit dan penyerapan anggaran Rp. 2.800.000. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan indikator Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan target 9000 unit dan anggaran Rp. 23.817.408.000, realisasi output sampai dengan triwulan I adalah 2250 unit dan penyerapan anggaran Rp. 1.357.072.000. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dengan indikator Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan target 102.252 unit dan anggaran Rp.135.874.563.000, realisasi output sampai dengan triwulan I adalah 116.531 unit dan penyerapan anggaran Rp. 32.266.597.000. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan dengan target 14 lokasi dengan sub kegiatan :

- 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) dengan indikator Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara dengan target 12 unit dan anggaran Rp. 16.991.018.000, realisasi output sampai dengan triwulan I adalah 14 unit dan penyerapan anggaran Rp. 2.970.459.000. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan target 60 berkas dengan sub kegiatan:

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 12 laporan dan anggaran Rp.16.785.982.000, realisasi output sampai dengan triwulan I adalah 3 laporan dan penyerapan anggaran Rp. 3.036.912. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR dengan target 134.525 unit dengan sub kegiatan :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia dengan target 33 unit dan anggaran Rp. 7.637.808.000, realisasi output sampai dengan triwulan I adalah 0 unit dan penyerapan anggaran Rp. 1.208.553.000. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan dengan target 7 jenis dan indikator Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan target 10 lokasi dengan sub kegiatan :

- 1) Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target 13 laporan dan anggaran Rp. 3.719.426.000, realisasi output sampai dengan triwulan I adalah 0 laporan dan penyerapan anggaran Rp.

188.753.000. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

- 2) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan target 12 laporan dan anggaran Rp. 27.085.111.000, realisasi output sampai dengan triwulan I adalah 3 laporan dan penyerapan anggaran Rp. 6.108.445.000. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

f. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya dengan target 3 koridor dan indikator Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan dengan target 75 orang dengan sub kegiatan :

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan target 2 laporan dan anggaran Rp. 3.536.695.000, realisasi output sampai dengan triwulan I adalah 0 laporan dan penyerapan anggaran Rp. 102.683.000. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia dengan target 72 unit dan anggaran Rp. 173.420.424.000, realisasi output sampai dengan triwulan I adalah 167 unit, penyerapan anggaran sebesar Rp.28.340.348.000. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

g. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan dengan target 1 jaringan dengan sub kegiatan :

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 10 dokumen dan anggaran Rp. 3.845.386.000, realisasi output sampai dengan triwulan I adalah 0 dokumen dan penyerapan anggaran Rp. 110.462.000. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diukur dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan dengan target 100%. Capaian indikator program sampai dengan triwulan I sebesar 0,00%. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan dengan target 2 kali dengan sub kegiatan :

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 2 laporan dan anggaran Rp. 1.472.330.000, realisasi output sampai dengan triwulan I adalah 0 orang dan penyerapan anggaran Rp. 3.550.000. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

4. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diukur dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian dengan target 100%. Capaian indikator program sampai dengan triwulan I sebesar 0,00%. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian dengan target 2 kali dengan sub kegiatan :

- 2) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian dengan indikator Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian dengan target 2 dokumen dan anggaran Rp.5.679.967.000, realisasi output sampai dengan triwulan I adalah 0 orang dan penyerapan anggaran Rp.879.795.000. Sub kegiatan ini akan diusulkan untuk perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																				
2.15		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																				
2.15.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			123,067,835		80,580,955		104,164,000		14,038,876	-	-	-	-		14,038,876		14,038,876	11,41%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan [116]	92 %		94.39 %		92 %		94.94 %		-	-	-	-	94.94 %		94.94 %		103.20%		
2.15.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			73,040,321				61,276,734		11,925,816	-	-	-	-		11,925,816		11,925,816	16.33%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [285]	100 %		100 %		100 %		100 %		-	-	-	-	100 %		100 %		100.00%		
2.15.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [467]			73,040,321				61.276.734		11.925.816	-	-	-	-		11.925.816		11.925.816	16,33%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [4867]	287 Orang/bulan		256 Orang/bulan		258 Orang/bulan		242 Orang/bulan		-	-	-	-	242 Orang/bulan		242 Orang/bulan		84.32%		
2.15.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			5,949,269				5,647,613		616,133	-	-	-	-		616,133		616,133	10.36%		
			Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik [426]	100 %		100 %		100 %		100 %		-	-	-	-	100 %		100 %		100.00%		
2.15.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [923]			5,949,269				5.647.613		616.133	-	-	-	-		616.133		616.133	10,36%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [4870]	23 Paket		14 Paket		23 Paket		4 Paket		-	-	-	-	4 Paket		4 Paket		17.39%		
2.15.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14,725,751				7,887,159		1,496,927	-	-	-	-		1,496,927		1,496,927	10.17%		
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum [398]	100 %		100 %		100 %		100 %		-	-	-	-	100 %		100 %		100.00%		
2.15.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [722]			14,725,751				7.887.159		1.496.927	-	-	-	-		1.496.927		1.496.927	10,17%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [4869]	3 Laporan		5 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		-	-	-	-	3 Laporan		3 Laporan		100.00%		
2.15.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			29,352,493				29,352,493		0	-	-	-	-		0		0	0.00%		
			Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Parkir Tepi Jalan Umum [2306]	53 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-	-	-	-	3 Laporan		3 Laporan		5.66%		
			Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum [2307]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-	-	-	-	3 Laporan		3 Laporan		25.00%		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)							
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3				4	5		6		7		8					9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
2.15.01.2.10.0001					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [4819]			13,392,600				13.392.600		0		-		-		-		-			0		0		0,00%
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan [7819]	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		-		-		-		-		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100.00%	
2.15.01.2.10.0001					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [4820]			15,959,893				15.959.893		0		-		-		-		-			0		0		0,00%
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan [7820]	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		-		-		-		-		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100.00%	
2.15.02					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)			472,129,235			466,993,130		487,594,521		76,219,397		-		-		-		-		76,219,397		76,219,397		16,14%
						Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya [732]	80 %			92.54 %		80 %		92.65 %		-		-		-		-		92.65 %		92.65 %		115.81%	
						Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan [289]	48.75 %			48.86 %		48.70 %		66.55 %		-		-		-		-		66.55 %		66.55 %		136.51%	
						Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota [733]	50 km/jam			45.17 km/jam		48 km/jam		0.00 km/jam		-		-		-		-		0.00 km/jam		0.00 km/jam		0.00%	
						Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya [196]	80 %			81.28 %		80 %		80.00 %		-		-		-		-		80.00 %		80.00 %		100.00%	
2.15.02.2.02					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			323,533,151				234,572,671		34,152,783		-		-		-		-			34,152,783		34,152,783		10.56%
						Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya [614]	15 Lokasi			9 Lokasi		15 Lokasi		2 Lokasi		-		-		-		-		2 Lokasi		2 Lokasi		13.33%	
						Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya [1693]	31 Kawasan			31 Kawasan		31 Kawasan		32 Kawasan		-		-		-		-		32 Kawasan		32 Kawasan		103.23%	
2.15.02.2.02.0001					Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota [1648]			117,251,786				64,141,775		526.314		-		-		-		-			526.314		526.314		0.45%
						Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun [4871]	3000 Unit			10685 Unit		3000 Unit		368 Unit		-		-		-		-		368 Unit		368 Unit		12.27%	
2.15.02.2.02.0002					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota [1650]			28,689,292				10.738.926		2.800		-		-		-		-			2.800		2.800		0,01%
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia [4873]	2500 Unit			2051 Unit		2500 Unit		0 Unit		-		-		-		-		0 Unit		0 Unit		0.00%	
2.15.02.2.02.0004					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan [1651]			35,134,102				23.817.408		1.357.072		-		-		-		-			1.357.072		1.357.072		3,86%
						Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara [4874]	9000 Unit			9000 Unit		9000 Unit		2250 Unit		-		-		-		-		2250 Unit		2250 Unit		25.00%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)							
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
													K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
1	2	3				4	5		6		7		8		9	10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%						
2.15.02.2.02.0003					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan [1649]			142,457,971				135.874.563		32.266.597		-		-		-			32.266.597		32.266.597			22.65%
						Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara [4872]	105252 Unit		105846 Unit		102252 Unit		116531 Unit		-		-		-		116531 Unit		116531 Unit			110.72%		
2.15.02.2.03					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			29,006,404				16,991,018		2,970,459		-		-		-			2,970,459		2,970,459		10.24%	
						Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan [615]	14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		-		-		-		14 Lokasi		14 Lokasi			100.00%		
2.15.02.2.03.0011					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) [316]			29,006,404				16.991.018		2.970.459		-		-		-			2,970.459		2,970.459		10,24%	
						Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara [4862]	12 Unit		14 Unit		12 Unit		14 Unit		-		-		-		14 Unit		14 Unit			116.67%		
2.15.02.2.04					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			20,323,724				16,785,982		3,036,912		-		-		-			3,036,912		3,036,912		14.94%	
						Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir [871]	60 Berkas		94 Berkas		60 Berkas		27 Berkas		-		-		-		27 Berkas		27 Berkas			45.00%		
2.15.02.2.04.0002					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota [1652]			20,323,724				16.785.982		3.036.912		-		-		-			3.036.912		3.036.912		14,94%	
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota [4875]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan			25.00%		
2.15.02.2.05					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			8,140,371				7,637,808		1,208,553		-		-		-			1,208,553		1,208,553		14.85%	
						Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR [127]	134525 Unit		119969 Unit		134525 Unit		30511 Unit		-		-		-		30511 Unit		30511 Unit			22.68%		
2.15.02.2.05.0001					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor [1653]			8,140,371				7.637.808		1.208.553		-		-		-			1.208.553		1.208.553		14,85%	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia [4876]	33 Unit		34 Unit		33 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		0 Unit			0.00%		
2.15.02.2.06					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			21,001,558				30,804,537		6,297,198		-		-		-			6,297,198		6,297,198		29.98%	
						Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas [437]	10 Lokasi		10 Lokasi		10 Lokasi		2 Lokasi		-		-		-		2 Lokasi		2 Lokasi			20.00%		
						Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan Dikendalikan [1863]	7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		-		-		-		7 Jenis		7 Jenis			100.00%		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)						
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
													K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3				4	5		6		7		8		9	10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
2.15.02.2.06.0017						Penataan Manajemem dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota [320]			4,153,675				3.719.426		188.753		-	-	-	-		188.753		188.753			4,54%
						Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemem dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi [4863]		13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan		0 Laporan		-	-	-	-	0 Laporan		0 Laporan		0.00%			
2.15.02.2.06.0004						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota [321]			16,847,884				27.085.111		6.108.445		-	-	-	-		6.108.445		6.108.445			36,26%
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota [4864]		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-	-	-	-	3 Laporan		3 Laporan		25.00%			
2.15.02.2.09						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			65,033,247				176,957,118		28,443,031		-	-	-	-		28,443,031		28,443,031			43,74%
						Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan [317]		75 Orang		75 Orang		75 Orang		0 Orang		-	-	-	-	0 Orang		0 Orang		0.00%			
						Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya [126]		3 Koridor		18 Koridor		3 Koridor		14 Koridor		-	-	-	-	14 Koridor		14 Koridor		466.67%			
2.15.02.2.09.0002						Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota [310]			32,542,203				3.536.695		102.683		-	-	-	-		102.683		102.683			0,32%
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota [4860]		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		-	-	-	-	0 Laporan		0 Laporan		0.00%			
2.15.02.2.09.0003						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota [469]			32,491,043				173.420.424		28.340.348		-	-	-	-		28.340.348		28.340.348			87,23%
						Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia [4868]		72 Unit		167 Unit		72 Unit		167 Unit		-	-	-	-	167 Unit		167 Unit		231.94%			
2.15.02.2.11						Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			5,090,782				3,845,386		110,462		-	-	-	-		110,462		110,462			2,17%
						Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan [320]		1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan		0 Jaringan		-	-	-	-	0 Jaringan		0 Jaringan		0.00%			
2.15.02.2.11.0001						Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota [311]			5,090,782				3.845.386		110.462		-	-	-	-		110.462		110.462			2,17%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II K Rp. (000)	III K Rp. (000)	IV K Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
													K	Rp.(000)										
1	2	3				4	5		6		7		8						12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota [4861]	10 Dokumen		6 Dokumen		10 Dokumen	0 Dokumen		-	-	-	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%		
2.15.03					Program Pengelolaan Pelayaran			3,518,992		1,336,776		1,472,330		3,550	-	-	-	-	3,550		3,550		0,10%	
					Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan [392]		100 %		100.00 %		100 %	0.00 %		-	-	-	-	0.00 %		0.00 %		0.00%		
2.15.03.2.04					Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota			3,518,992				1,472,330		3,550	-	-	-		3,550		3,550		0.10%	
					Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan [455]		2 Kali		2 Kali		2 Kali	0 Kali		-	-	-	-	0 Kali		0 Kali		0.00%		
2.15.03.2.04.0002					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota [324]			3,518,992				1,472,330		3,550	-	-	-		3,550		3,550		0,10%	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota [4865]		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan		-	-	-	-	0 Laporan		0 Laporan		0.00%		
2.15.05					Program Pengelolaan Perkeretaapian			5,874,008		4,941,921		5,679,967		879,795	-	-	-	-	879,795		879,795		14,98%	
					Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian [395]		100 %		100.00 %		100 %	0.00 %		-	-	-	-	0.00 %		0.00 %		0.00%		
2.15.05.2.01					Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			5,874,008				5,679,967		879,795	-	-	-	-	879,795		879,795		14,98%	
					Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian [456]		2 Kali		2 Kali		2 Kali	0 Kali		-	-	-	-	0 Kali		0 Kali		0.00%		
2.15.05.2.01.0002					Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian [326]			5,874,008				5,679,967		879,795	-	-	-	-	879,795		879,795		14,98%	
					Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian [4866]		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen		-	-	-	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya adalah Visi dan Misi Kepala Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan harus sejalan dan dapat mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan dan peraturan-peraturan yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Untuk mewujudkan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, didukung dari dana APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan tahun 2025 mengacu pada RKPD Perubahan Kota Surabaya Tahun 2025 yang pada umumnya dapat berupa perubahan output kegiatan dan sub kegiatan, target capaian kinerja serta kebutuhan dana/pagu indikatif. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025 dirumuskan dalam 4 (tiga) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran, dan Program Pengelolaan Perkeretaapian.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 sebanyak 19 (sembilan belas) sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan tahun 2025 tetap akan melaksanakan 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak mengalami perubahan anggaran

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan BBM yang mengalami kenaikan harga serta penyesuaian kebutuhan lainnya

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan tenaga operasional pendukung pelaksanaan kegiatan operasional Dinas Perhubungan

d. Peningkatan Pelayanan BLUD.

1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional Pelayanan BLUD Parkir Tepi Jalan Umum.

2) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

1) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan pemasangan PJU.

2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan penyediaan perlengkapan jalan seperti rambu, cermin tikungan, dsb.

3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan.

Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan pemeliharaan PJU

4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan pemeliharaan perlengkapan jalan seperti marka, pita penggaduh, dan kebutuhan pemeliharaan SITS Bratang.

b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.

1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal.

Sub kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional Terminal di 14 lokasi.

c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional penyelenggaraan parkir.

d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional penyelenggaraan BBM yang mengalami kenaikan harga serta pengadaan Reader SAM dan Reader RFID Printer Smartcard untuk hasil pengujian kendaraan bermotor

e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

2) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.

f. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional kegiatan operasional angkutan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.

2) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional kegiatan serta penyesuaian kegiatan Abdi Yasa Teladan menjadi sosialisasi keselamatan kepada pengemudi angkutan umum.

g. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan penyusunan dokumen sesuai dengan prioritas kebutuhan.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

- a. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau.

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional pengawasan keselamatan transportasi perairan.

4. Program Pengelolaan Perkeretaapian

- a. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian.

- 1) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian.

Sub kegiatan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian mengalami perubahan anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional pengawasan keselamatan perlintasan sebidang.

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Perhubungan
Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92 %	104,164,000,206	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92 %	101,646,870,571	
	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	61,276,733,970	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	59,575,832,580	
	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	258 Orang/bulan	61,276,733,970	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	242 Orang/bulan	59,575,832,580	
	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	5,647,613,461	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	4,193,554,979	
	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	5,647,613,461	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	4,193,554,979	
	2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100 %	7,887,159,289	2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100 %	8,524,989,526	
	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	7,887,159,289	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	8,524,989,526	
	2.15.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Parkir Tepi Jalan Umum	12 Laporan	29,352,493,486	2.15.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Parkir Tepi Jalan Umum	12 Laporan	29,352,493,486	
			Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum	12 Laporan				Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum	12 Laporan		
	2.15.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Perhubungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	13,392,600,396	2.15.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Perhubungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	13,392,600,396	
	2.15.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Perhubungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	15,959,893,090	2.15.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Perhubungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	15,959,893,090	
2	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	48 km/jam	487,594,521,168	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	48 km/jam	472,219,408,483	
			Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48,70 %				Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48,70 %		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80 %				Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80 %		
			Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80 %				Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80 %		
	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan	234,572,671,293	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan	228,405,504,882	
			Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	15 Lokasi				Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	15 Lokasi		
	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3000 Unit	64,141,775,197	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3000 Unit	62,428,408,019	
	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit	10,738,925,544	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit	10,076,042,720	
	2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	102252 Unit	135,874,562,678	2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	117.344 Unit	133,435,286,655	
	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9000 Unit	23,817,407,874	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9000 Unit	22,465,767,488	
	2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	16,991,017,589	2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	16,074,351,876	
	2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dinas Perhubungan	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	12 Unit	16,991,017,589	2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dinas Perhubungan	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	12 Unit	16,074,351,876	
	2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas	16,785,981,684	2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas	14,551,850,297	
	2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	16,785,981,684	2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	14,551,850,297	
	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	134525 Unit	7,637,808,345	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	120.000 Unit	7,200,696,214	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit	7,637,808,345	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit	7,200,696,214	
	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan	7 Jenis	30,804,537,313	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan	7 Jenis	32,516,217,128	
			Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi				Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3 Lokasi		
	2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	27,085,111,046	2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	30,819,975,153	
	2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	13 Laporan	3,719,426,267	2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	5 Laporan	1,696,241,975	
	2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	3 Koridor	176,957,118,454	2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	14 Koridor	171,736,398,806	
			Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang				Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang		
	2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	3,536,694,587	2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	1,738,294,034	
	2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	72 Unit	173,420,423,867	2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	167 Unit	169,998,104,772	
	2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan	3,845,386,490	2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan	1,734,389,280	
	2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan	10 Dokumen	3,845,386,490	2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan	4 Dokumen	1,734,389,280	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100 %	1,472,330,120	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100 %	1,129,898,886	
	2.15.03.2.04 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali	1,472,330,120	2.15.03.2.04 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali	1,129,898,886	
	2.15.03.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	1,472,330,120	2.15.03.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	1,129,898,886	
4	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100 %	5,679,966,845	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100 %	5,208,641,716	
	2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian	2 Kali	5,679,966,845	2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian	2 Kali	5,208,641,716	
	2.15.05.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen	5,679,966,845	2.15.05.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen	5,208,641,716	

Dalam tabel 3.1 rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada kegiatan maupun sub kegiatan mengalami perubahan output maupun anggaran. Sub Kegiatan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi anggaran semula Rp. 61.276.733.970 menjadi sebesar Rp. 59.575.832.580 dengan asumsi target output Sub Kegiatan dapat tercapai;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi anggaran semula Rp. 5.647.613.461 menjadi sebesar Rp. 4.193.554.979 dengan asumsi target output Sub Kegiatan dapat tercapai;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi anggaran semula Rp. 7.887.159.289 menjadi sebesar Rp. 8.524.989.526 dengan asumsi target output Sub Kegiatan dapat tercapai;
4. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD alokasi anggaran semula dan menjadi sebesar Rp. 13.392.600.396 dengan asumsi belum ada kebutuhan untuk penyesuaian anggaran dan diasumsikan target output Sub Kegiatan dapat tercapai;
5. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD alokasi anggaran semula dan menjadi sebesar Rp. 15.959.893.090 dengan asumsi belum ada kebutuhan untuk penyesuaian anggaran dan diasumsikan target output Sub Kegiatan dapat tercapai;
6. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota alokasi anggaran semula Rp. 64.141.775.197 menjadi sebesar Rp. 62.428.408.019 dengan asumsi target output Sub Kegiatan dapat tercapai;
7. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota alokasi anggaran semula Rp. 10.738.925.544 menjadi sebesar Rp. 10.076.042.720 dengan asumsi target output Sub Kegiatan dapat tercapai;
8. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan alokasi anggaran semula Rp. 135.874.562.678 menjadi sebesar Rp. 133.435.286.655 dengan asumsi target output Sub Kegiatan dapat tercapai;
9. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan alokasi anggaran semula Rp. 23.817.407.874 menjadi sebesar Rp. 22.465.767.488 dengan asumsi target output Sub Kegiatan dapat tercapai;

10. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) alokasi anggaran semula Rp. 16.991.017.589 menjadi sebesar Rp. 16.074.351.876 dengan asumsi target output Sub Kegiatan dapat tercapai;
11. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota alokasi anggaran semula Rp. 16.785.981.684 menjadi sebesar Rp. 14.551.850.297 dengan asumsi target output Sub Kegiatan dapat tercapai;
12. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor alokasi anggaran semula Rp. 7.637.808.345 menjadi sebesar Rp. 7.200.696.214 dengan asumsi target output Sub Kegiatan dapat tercapai;
13. Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota alokasi anggaran semula Rp. 3.719.426.267 menjadi sebesar Rp. 1.696.241.975 dengan asumsi target output Sub Kegiatan dapat tercapai;
14. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota alokasi anggaran semula Rp. 27.085.111.046 menjadi sebesar Rp. 30.819.975.153 dengan asumsi target output Sub Kegiatan dapat tercapai;
15. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota alokasi anggaran semula Rp. 173.420.423.867 menjadi sebesar Rp. 169.998.104.772 dengan asumsi target output Sub Kegiatan dapat tercapai;
16. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota alokasi anggaran semula Rp. 3.536.694.587 menjadi sebesar Rp. 1.738.294.034 dengan asumsi target output Sub Kegiatan dapat tercapai;
17. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota alokasi anggaran semula Rp. 3.845.386.490 menjadi sebesar Rp. 1.734.389.280 dengan asumsi target output Sub Kegiatan dapat tercapai;
18. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau alokasi anggaran semula Rp. 1.472.330.120 menjadi sebesar Rp. 1.129.898.886 dengan asumsi target output Sub Kegiatan dapat tercapai;

19. Sub Kegiatan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian alokasi anggaran semula Rp. 5.679.966.845 menjadi sebesar Rp. 5.208.641.716 dengan asumsi target output Sub Kegiatan dapat tercapai;

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan pada Tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan rancangan awal RKPD tahun 2025. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perhubungan akan disempurnakan menjadi dokumen Renja Perubahan berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kota Surabaya tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Surabaya serta visi dan misi Dinas Perhubungan pada khususnya sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 26 JUN 2025

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kota Surabaya



Trio Wahyu Bowo, Amd.LLAJ, SE, MM

Pembina Tingkat I

NIP 196901131993011002